



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/208/2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN IMS
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 445/Menkes/SK/XI/2013, berdasarkan rekomendasi, kondisi dan kebutuhan yang ada perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan, struktur, tugas dan fungsi Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Suntik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut Kelompok Kerja, terdiri dari Sub Pokja, Tim Panel Ahli, dan dibantu oleh Sekretariat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sosialisasi kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 2. mengintegrasikan dan mensinergikan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan IMS yang sudah dilakukan oleh program lain dalam pencapaian target.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Sub Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 2. melakukan kajian terhadap masalah atau isu-isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 3. memberikan masukan atau rekomendasi kepada Kelompok Kerja untuk pengembangan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 4. membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada sekretariat untuk dibahas pada saat rapat Kelompok Kerja.
- KELIMA : Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri dari Sub Panel Ahli, yang bertugas:
1. memberikan masukan secara teknis kepada Kelompok Kerja atau Sub Pokja sesuai bidang keahliannya;
 2. melakukan kajian terhadap program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS sesuai bidangnya;
 3. menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk mengkaji dan membahas isu penting dalam program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 4. memfasilitasi masing-masing Sub Pokja dalam pengembangan bidang tugasnya.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan *budgeting*, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 2. mengkompilasi penyusunan rencana kerja dan laporan masing-masing Sub Pokja dan Tim Panel Ahli; dan
 3. memfasilitasi kegiatan terkait Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN...

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 445/Menkes/SK/XI/2013 tentang Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/208/2015
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN IMS
KEMENTERIAN KESEHATAN

- Ketua : Menteri Kesehatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
6. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

I. Sub Pokja

- A. Sub Pokja Pemberdayaan, Pencegahan, dan Dukungan Berbasis
Masyarakat, Termasuk Kelompok Dukungan Sebaya

Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Komunikasi Publik
2. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
4. Direktur Bina Ketahanan Remaja, BKKBN

B. Sub Pokja Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)

- Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Koordinator Sub Pokja Seksual : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Koordinator Sub Pokja Non Seksual : Direktur Bina Kesehatan Jiwa
Koordinator Sub Pokja PPIA : Direktur Bina Kesehatan Ibu

- Anggota : 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
4. Direktur Bina Gizi
5. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
6. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
7. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
8. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
9. Direktur Bina Kesehatan Anak
10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
11. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT, BPOM
12. Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM
13. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN
14. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

C. Sub Pokja Pengembangan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

- Anggota
1. Sesditjen BUK
 2. Sesditjen Bina Gizi dan KIA
 3. Direktur SIMKARKESMA
 4. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes
 5. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Balitbangkes
 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, BPPSDM Kesehatan

D. Sub Pokja Regulasi dan Advokasi

- Ketua : SAM Bidang Medikolegal
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Biro Hukum dan Humas BPOM
 3. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BKKBN
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

II. Tim Panel Ahli

- Ketua Umum : Prof. DR. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD (KHOM), FINASIM
- Sekretaris 1 : dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD, KPTI, FINASIM
- Sekretaris 2 : dr. Hanny Nilasari, Sp.KK
- Sub Panel Ahli :
- Ketua Sub Panel Ahli
Epidemiologi dan Pencegahan : Prof. dr. Budi Utomo, MPH, PhD
- Ketua Sub Panel Ahli
Diagnostik, Pengobatan, dan Prognosis : Prof. DR. dr. Retno Wahyuningsih, MS, Sp.Ark
- Ketua Sub Panel Ahli
Kebijakan, Advokasi, dan Sistem Kesehatan Termasuk Pembiayaan : Prof. DR. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, M.Si, Sp.F(K)

Anggota:

1. Prof. DR. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD (KAI), FINASIM
2. Prof. DR. dr. Tuti Parwati Merati, Sp.PD, KPTI
3. Prof. DR. dr. Nurpudji Astuti Taslim, MPH, Sp.GK(K)

4. Prof. DR. dr. Rianto Setiabudy, Sp.FK
5. Prof. DR. dr. H. M. Alimin Maidin, MPH
6. Prof. dr. Budi Mulyono, Sp.PK(K), MM
7. Prof. dr. Saiful F. Daili, Sp.KK (K)
8. Prof. dr. Irwanto, M.Sc, PhD
9. Prof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, MPH
10. Prof. dr. Sori Muda Sarumpaet, MPH
11. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD
12. DR. dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD, KPTI, M.Kes, FINASIM
13. DR. dr. Wresti Indriatmi, Sp.KK(K), M.Epid, FINSADV, FAADV
14. DR. dr. Hans Lumintang, Sp.KK (K), DSTD
15. DR. dr. Anak Agung Gde Putra Wiraguna, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV
16. DR. dr. Evy Yunihastuti, Sp.PD (KAI), FINASIM
17. DR. dr. Budiman Bela, Sp.MK
18. DR. dr. Ahmad Rizal Ganiem, Sp.S, PhD
19. DR. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K)
20. DR. dr. Ali Sungkar, Sp.OG(K)
21. DR. dr. Agus Susanto Kosasih, Sp.PK, MARS
22. DR. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc
23. DR. Mondastri Korib Sudaryo, MS. DSC
24. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc
25. DR. dr. Windhu Purnomo, M.S
26. dr. Husniah R. TH. Akib, M.S, M.Kes, Sp.AK(K), Sp.FK
27. dr. Fera Ibrahim, Sp.MK, PhD, M.Sc
28. dr. Yanri Wijayanti, Sp.PD, PhD, FINASIM
29. dr. Rudi Wisaksana, Sp.PD, KPTI, PhD
30. dr. Kurnia Fitri Jamil, M.Kes, Sp.PD, KPTI, FINASIM
31. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD, KPTI
32. dr. Anna Uyainah ZN, Sp.PD, K-P, MARS
33. dr. Santoso Edy Budiono, Sp.KK, FAADV

34. dr. Jarir At Thobari, Dpharm, PhD
35. dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK
36. dr. Pandu Riono, MPH, PhD
37. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK(K), MM
38. dr. July Kumalawati, DMM, Sp.PK(K)
39. dr. Hari Paraton, Sp.OG(K)
40. dr. Dina Muktiarti, Sp.A(K)
41. dr. Dyani Kusumowardhani, Sp.A
42. dr. Ekarini Aryasatiani, Sp.OG(K)
43. dr. Janto Gunawan Lingga, Sp.P
44. dr. S.H. Manullang, Sp.B(K), FICS
45. dr. Nia Kurniati, Sp.A (K)
46. dr. Darma Imran, Sp.S(K)
47. dr. Grace Daimboa, Sp.PD
48. dr. Paul Frans Matulesy, MN, Sp.GK
49. dr. Dewi Wulandari, Sp.PK
50. dr. I. Nyoman Kandun, MPH
51. dr. Sri Pandam Pulungsih, M.Sc
52. dr. H. Armen Ahmad, Sp.PD, KPTI
53. dr. Asep Purnama, Sp.PD
54. dr. Farida Zubier, Sp.KK
55. dr. Ratna Mardiati, Sp.KJ
56. dr. Nirmala Kesumah, MHA
57. dr. Dyah Agustina Waluyo
58. drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes, MH
59. drg. Burhanuddin Agung, MM
60. dr. E.Y. Wenny Astuti Achwan, M.Kes

61. Drs. Octavery Kamil, M.Si
62. Dra. Retno Suhapti, SU, MA, Psi
63. Ace Sudrajat, S.Kp, M.Kes
64. Nelly Yardes, S.KP, M.Kes

III. Sekretariat

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Wakil Ketua : Kasubdit AIDS dan PMS
- Sekretaris : Kepala Seksi Standarisasi, Subdit AIDS dan PMS
- Perencanaan : Kepala Seksi Bimbingan dan Kemitraan, Subdit
AIDS dan PMS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK